



# Tujuh Fraksi Sepakati LPj Pelaksanaan APBD 2018

## ▶ Rapat Sempit Diskor

**NANGA PINOH, SP** – Seluruh Fraksi DPRD Melawi menyepakati Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD, Selasa (29/10).

DPRD sendiri menggelar rapat paripurna secara maraton hingga Kamis untuk mengejar ketuk palu APBD Perubahan.

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Melawi, Hendegi Januardi UY, mengagendakan empat agenda penting, yakni penyampaian Pendapat Akhir Fraksi tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018, Persetujuan DPRD Melawi atas Raperda pelaksanaan APBD 2018.

Juga persetujuan DPRD Melawi dan penandatanganan nota kesepahaman Bersama tentang rancangan KUA PPAS Perubahan APBD 2019 serta penyampaian nota keuangan perubahan RAPBD 2019.

Rapat paripurna sendiri sempat diskor selama 30 menit setelah muncul interupsi di awal-awal persidangan.

Anggota DPRD Melawi, Yordanes mempertanyakan hasil pembahasan Pansus Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 dan meminta agar ada tambahan waktu bagi pansus untuk bisa membahas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 lebih maksimal.

Setelah skor dicabut, agenda pembacaan Pendapat Akhir Fraksi pun kembali berlanjut. Sejumlah fraksi seperti PDI Perjuangan meminta agar penyampaian

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD semestinya bisa tepat waktu dan mengacu pada regulasi undang-undangan.

“Kita harapkan ke depan, penyampaian LPj Pelaksanaan APBD bisa lebih tepat waktu sehingga tertib administrasi,” kata Edysun Bundajono, juru bicara Fraksi PDIP.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Persatuan Demokrasi Rakyat Sejahtera, Widya Rima, menilai banyak hal yang jauh dari kata memuaskan dalam LPj Pelaksanaan APBD 2018. Seperti, tren PAD Melawi yang dianggap terus mengalami penurunan, padahal potensi sumber PAD semestinya meningkat.

“Ada beberapa sumber penerimaan pajak yang tidak rasional atau jauh di bawah target yang ditetapkan. Kami harapkan Pemda harus mencari terobosan baru agar PAD terus meningkat,” ujarnya.

Widya juga meminta Pemkab memperhatikan utang DAK 2017 dan DAK 2018 yang belum terbayarkan pada pihak ketiga. Termasuk juga utang DAU 2018 yang harus dilunasi.

Munculnya utang tersebut, kata Widya, disinyalir bersumber dari ketidakmampuan OPD dalam pelaksanaan di lapangan sehingga berujung pada laporan capaian yang tidak mampu terkejar di akhir tahun anggaran.

“Dampaknya, tentu utang ini membebani DAU APBD Melawi yang semestinya bisa digunakan untuk prioritas pembangunan lainnya,” katanya.



**Widya Rima** “  
 Juru Bicara Fraksi Persatuan Demokrasi Rakyat Sejahtera

**Ada beberapa sumber penerimaan pajak yang tidak rasional atau jauh di bawah target yang ditetapkan. Kami harapkan Pemda harus mencari terobosan baru agar PAD terus meningkat.**



Sementara itu, Fraksi Persatuan Bangsa melalui juru bicaranya Heri Iskandar, menyoroti rendahnya rasa tanggung jawab dari kepala SKPD dalam hal membuat laporan progress report dan pertanggungjawaban Kegiatan, yang ikut andil dalam keterlambatan LPj Pelaksanaan APBD 2018. Sehingga, memberikan efek kurang berkualitasnya hasil laporan APBD tahun 2018.

“Fraksi kami tak menginginkan kemitraan Lembaga DPRD ini dan Pemerintah hanya sebagai simbol pengesahan APBD saja, tapi juga menjadi sistem kontrol yang baik. Karenanya, perlu sikap bijak dari Pemkab untuk saling

menghormati dan bekerja sama, termasuk dalam sidang-sidang penting” tuturnya.

Sedangkan dari Fraksi PAN melalui juru bicaranya Hermanus mengatakan, opini BPK terhadap laporan keuangan Melawi yang berkuat pada Wajar Dengan Pengecualian (WDP), menunjukkan bahwa belum ada kemajuan signifikan dari segi pengelolaan keuangan daerah secara administrasi akuntansi dan temuan-temuan oleh BPK, masih berkuat pada masalah yang hampir sama pada temuan di tahun anggarannya sebelumnya.

“Saran kami, terkait Silpa yang masih cukup besar mengindikasikan program pemerintah banyak yang tidak terlaksana, sehingga kinerja OPD belum optimal. Pemerintah harus lakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi,” ujarnya.

PAN juga meminta agar Pemkab menindaklanjuti catatan dan rekomendasi LHP BPK RI atas laporan keuangan Pemkab Melawi tahun anggaran 2018. Serta menindaklanjuti beberapa catatan dari fraksi-fraksi DPRD Melawi. **(eko/lha)**



RAPAT PARIPURNA - Penandatanganan persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 oleh pimpinan DPRD serta Bupati Melawi.



SUARA PEMRED/EKO SUSILO